



BADAN PEMBINAN IDEOLOGI PANCASILA

LAPORAN KINERJA

20 20

SEKRETARIAT UTAMA



Kata Pengantar



Laporan Kinerja Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan potret pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2020. Penyusunan laporan Kinerja Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2018 tanggal 19 April 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sasaran terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di capai dengan program dukungan manajemen dan tugas teknis terkait lainnya.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai Lembaga yang relatif masih baru, terus berupaya dan berbenah guna penguatan kelembagaan dan memenuhi amanat substansi pembinaan ideologi Pancasila. Semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban atas amanat yang diemban, dan menjadi peningkatan kinerja organisasi. Laporan Kinerja Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini menjadi cerminan bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi tahun 2020, agar dapat melaksanakan kinerja kedepan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan, maupun koordinasi pelaksanaan.

Sekretaris Utama
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,


KARJONO

Daftar Isi

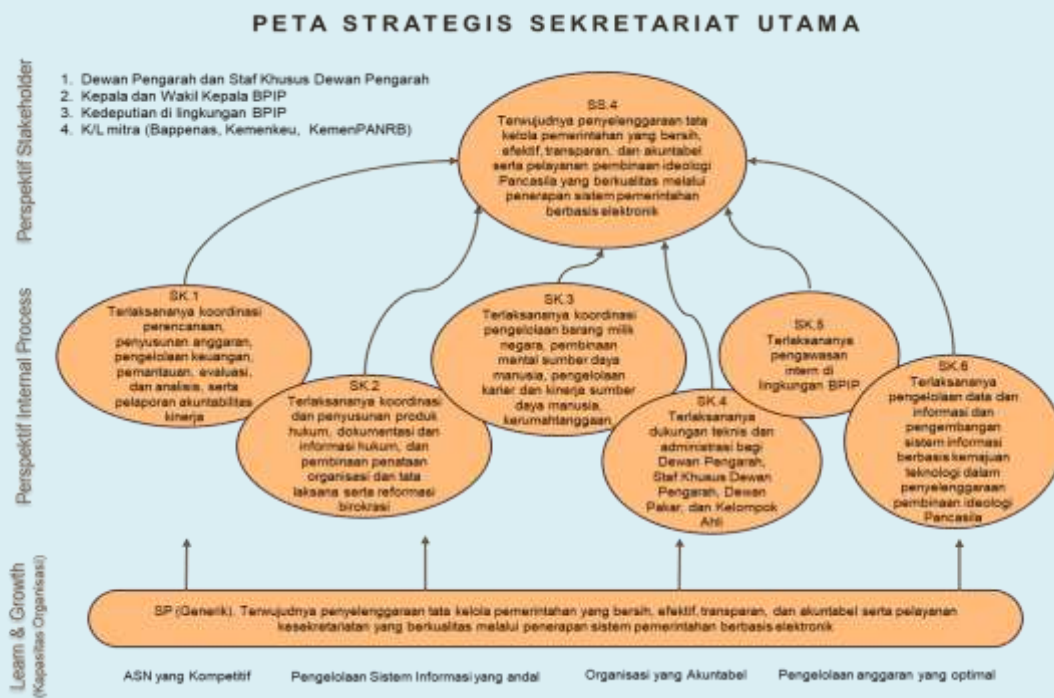
KATA PENGANTAR.....	i	
DAFTAR ISI.....	ii	
DAFTAR GAMBAR	iii	
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang.....	1	
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	1	
1.3. Susunan Organisasi.....	2	
1.4. Aspek Strategis.....	4	
1.5. Isu Strategis.....	4	
BAB II PERENCANAAN KINERJA		
2.1. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024.....	5	
2.2. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020	8	
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	9	
2.4. Pengukuran Kinerja.....	10	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		
3.1. Capaian Kinerja.....	11	
3.2. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja.....	11	
3.2.1. Nilai Reformasi Birokrasi.....	12	
3.2.2. Indeks Sistem merit.....	19	
3.2.3. Opini Laporan Keuangan oleh BPK	25	
3.2.4. Nilai SAKIP.....	28	
3.2.5. Indeks Profesionalisme ASN.....	33	
3.2.6. Indeks Kepuasan Masyarakat.....	39	
3.2.7. Kinerja Layanan Kesekretariatan (Perspektif Proses Internal)	40	
3.3. Perbandingan Indikator Tahun 2019 dan Tahun 2020.....	51	
3.4. Realisasi Anggaran.....	52	
3.5. Efisiensi Sumber Daya dan Upaya Perbaikan ke Depan	53	
BAB IV PENUTUP		55
Lampiran		
I. Perjanjian Kinerja Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.		
II. Ikhtisar Kinerja Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.		

Daftar Gambar

- Gambar 1. Struktur Organisasi Settama BPIP – [3]
- Gambar 2. Tabel Komposisi SDM BPIP – [3]
- Gambar 3. Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Rencana Strategis Settama BPIP 2020-2024 – [6]
- Gambar 4. Peta Strategis Settama BPIP – [7]
- Gambar 5. Alokasi Anggaran Settama BPIP TA 2020 – [8]
- Gambar 6. Tabel Indikkator Kinerja Utama Settama Tahun BPIP 2020 - [11]
- Gambar 7. Tabel Capaian Kinerja Pelaksanaan RB BPIP Berdasarkan Rencana Aksi Area Perubahan – [13]
- Gambar 8. Tabel Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi – [14]
- Gambar 9. Tabel Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan SAKIP – [29]
- Gambar 10. Indeks Profesionalitas ASN BPIP – [38]
- Gambar 11. Sistem Informasi Berbasis Online di Lingkungan BPIP – [48]
- Gambar 12. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dan 2020 – [51]
- Gambar 13. Tabel Realisasi Anggaran per Unir Eselon II Settama BPIP – [52]
- Gambar 14. Tabel Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dan Nilai Kinerja Unit Kerja (NKUK) – [54]

Ringkasan Eksekutif

Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, serta mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Untuk itu, seluruh kinerja Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Tahun 2020 merupakan kinerja tahun pertama Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila periode 2020-2024. Peta Strategis Sekretariat Utama guna menunjang keberhasilan Sasaran Strategis BPIP adalah sebagai berikut.



Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya secara langsung menjadi salah satu sasaran strategis BPIP yang berkontribusi erat pada keberhasilan sasaran strategis substansi pembinaan ideologi Pancasila.

Pengukuran kinerja Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2020 menunjukkan tercapai 5 indikator, dan masih terdapat 1 indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat yang belum dilaksanakan pada Tahun 2020. Tabel capaian indikator kinerja utama Sekretariat Utama Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Terwujudnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel serta Pelayanan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Berkualitas Melalui Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Nilai Reformasi Birokrasi	81	44,14
	2. Indeks Sistem Merit	0,61	0,8
	3. Opini Laporan Keuangan oleh BPK	WTP	WTP
	4. Nilai SAKIP	BB	B
	5. Indeks Profesionalisme ASN	81	30
	6. Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	N/A (belum survei)

Beberapa capaian strategis Tahun 2020 diantaranya adalah :

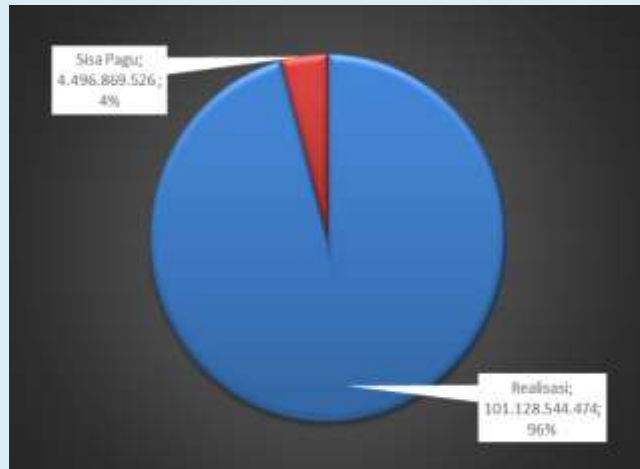
1. Penerapan sistem informasi terpadu berbasis elektronik (penerapan e-government yang baik) di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Penguatan organisasi melalui penyelarasan uraian tugas, penyusunan dan penerapan SOP;
3. Keterlibatan aktif pimpinan dalam pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi;
4. Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas lingkungan kerja;
5. Tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana kinerja dan anggaran di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
6. Melaksanakan publikasi dan pelayanan informasi yang berkualitas berbasis elektronik kepada stakeholder yang berkaitan dengan kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Selain itu, sebagai unit pendukung yang memberikan layanan pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh komponen Badan Pembinaan dan Ideologi Pancasila, ruang lingkup kinerja layanan adalah:

- a. Koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan akuntabilitas;
- b. Koordinasi dan penyusunan produk hukum, dokumentasi dan informasi hukum, dan pembinaan penataan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi;
- c. Koordinasi pengelolaan barang milik negara, pembinaan mental sumber daya manusia, pengelolaan karier dan kinerja sumber daya manusia, kerumahtanggaan;
- d. Dukungan teknis dan administrasi bagi Dewan Pengarah, Staf Khusus Dewan Pengarah, Dewan Pakar, dan Kelompok Ahli;
- e. Pengawasan intern di lingkungan BPIP; dan

- f. Pengelolaan data dan informasi dan pengembangan Sistem informasi berbasis kemajuan teknologi dalam penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila.

Capaian kinerja anggaran Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020 yaitu 95,74%. Pagu anggaran adalah Rp105.625.414.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp101.128.544.474,- dan sisa pagu anggaran sebesar Rp4.496.869.526,-.



BPIP sebagai lembaga pemerintah yang efektif baru berusia 2 tahun, berupaya mengejar pemenuhan-pemenuhan penguatan kelembagaan agar dapat menyamai lembaga-lembaga pemerintah lain yang telah mandiri. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan kapasitas organisasi diarahkan pada sumber daya manusia yang kompetitif, pengelolaan sistem informasi yang andal, organisasi yang akuntabel, dan pengelolaan anggaran yang optimal dengan mengedepankan tata kelola yang bersih, transparan, dan efektif. Budaya pelayanan prima yang dijiwai *core value* BPIP, yaitu andal, profesional, inovatif dan integritas secara simultan membentuk pola pikir dan budaya kerja berbasis kinerja berasaskan nilai-nilai Pancasila.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPIP. Sebagai bagian dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang memiliki kedudukan sebagai unsur pendukung dan koordinator seluruh kegiatan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Sekretariat Utama melaporkan kinerjanya sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja selama tahun anggaran 2020.

Laporan kinerja merupakan pemenuhan amanat Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan potret tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2020 dan sekaligus sebagai alat kendali, dan pemacu peningkatan kinerja setiap Unit Kerja (Biro/Pusat) di lingkungan Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Laporan kinerja sebagai salah satu alat untuk perbaikan kinerja Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman teknis penyusunan adalah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Utama

Berdasarkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 19 April 2019 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah sebagai berikut:

Kedudukan

Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala.

Tugas Pokok

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPIP.

Fungsi

- a. Koordinasi kegiatan di lingkungan BPIP;
- b. Koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan BPIP;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administratif yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
- g. Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BPIP; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

1.3 Susunan Organisasi dan Sumber Daya Manusia

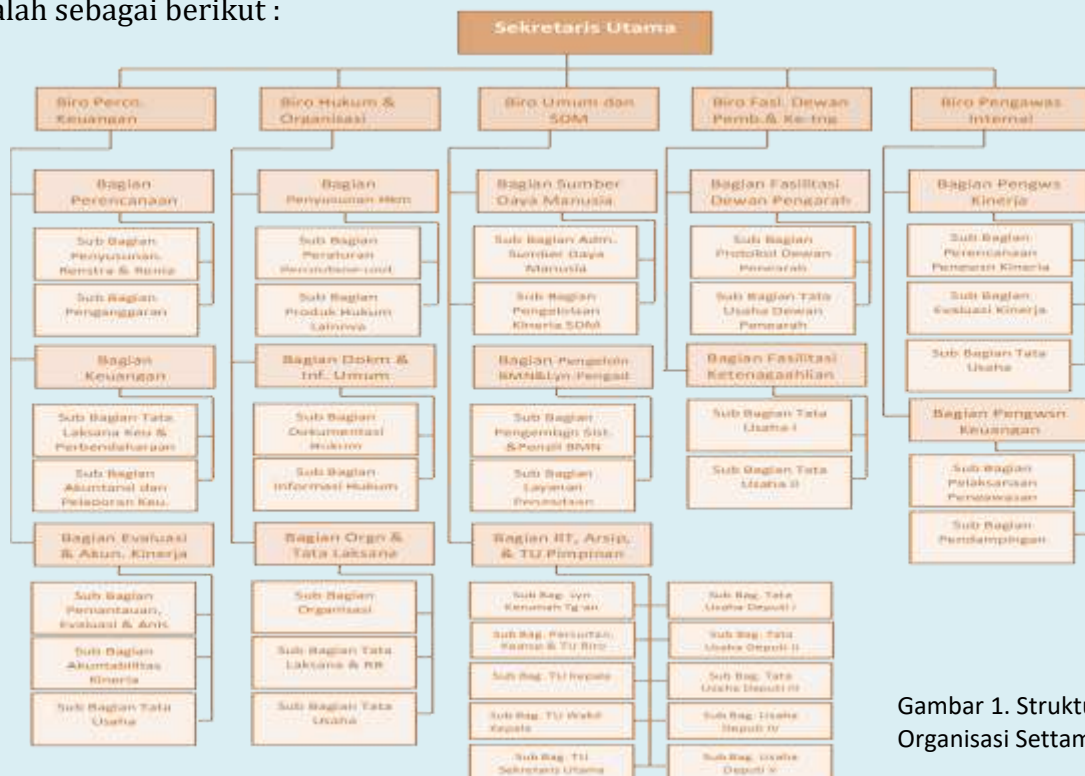
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila membawahi 5 (lima) Biro dan 1 (satu) Pusat Data dan Informasi, sebagai berikut:

- a. Biro Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan akuntabilitas kinerja;
- b. Biro Hukum dan Organisasi, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan produk hukum, dokumentasi dan informasi hukum, dan pembinaan penataan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi;
- c. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan barang milik negara, pembinaan sumber

daya manusia, pengelolaan karier dan kinerja sumber daya manusia, kerumahtangaan, pembinaan dan layanan ketatausahaan, urusan persuratan, dan kearsipan;

- d. Biro Fasilitasi Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian, mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi bagi Dewan Pengarah, Staf Khusus Dewan Pengarah, Dewan Pakar, dan Kelompok Ahli;
- e. Biro Pengawasan Internal, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BPIP; dan
- f. Pusat Data dan Informasi, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi dan pengembangan sistem informasi berbasis kemajuan teknologi dalam penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila.

Struktur organisasi Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Settama BPIP

Komposisi Sumber Daya Manusia adalah :

Gambar 2. Tabel Komposisi SDM BPIP

No	Unit Kerja	JUMLAH								
		Kepala Waka	PT Madya	PT Pertama Staf Khusus	Admisi Integ	Pegawa	Pelaksana (PUSKID)	Pelaksana (PMKO)	PTI	TOTAL
1	Kepala dan Wakil Kepala	2								2
2	Staf Khusus			3						3
3	Sekretariat Utama	1	6		14	31	28	20	79	179
4	Deputi I	-	3		7	-	7	8	7	32
5	Deputi II	-	1		9	-	9	12	2	33
6	Deputi III	1	3		2	-	9	8	2	25
7	Deputi IV	1	2		8	-	9	6	3	29
8	Deputi V	1	2		6	-	6	6	3	24
	JUMLAH	2	4	17	3	46	31	68	96	327

1.4 Aspek Strategis

Aspek strategis Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah sebagai penopang jalannya organisasi dengan peran kunci dukungan manajemen, administrasi, sumber daya sehingga upaya pembinaan ideologi Pancasila dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. Ruang lingkup peran kunci tersebut adalah:

- a. Koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan akuntabilitas kinerja;
- b. Koordinasi dan penyusunan produk hukum, dokumentasi dan informasi hokum dan pembinaan penataan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi;
- c. Koordinasi pengelolaan barang milik negara, pembinaan mental sumber daya manusia, pengelolaan karier dan kinerja sumber daya manusia kerumahtanggaan;
- d. Dukungan teknis dan administrasi bagi Dewan Pengarah, Staf Khusus Dewan Pengarah, Dewan Pakar dan Kelompok Ahli;
- e. Pengawasan intern di lingkungan BPIP;
- f. Pengelolaan data dan informasi dan pengembangan system informasi berbasis kemajuan teknologi dalam penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila.

1.5 Isu Strategis

Tantangan yang dihadapi tahun 2020 antara lain yaitu:

- (i) Ekpektasi tingkat kepuasan yang tinggi;
- (ii) Pemenuhan teknologi informasi berbasis aplikasi
- (iii) Keharusan menjaga pengelolaan keuangan agar tetap berpredikat WTP
- (iv) Peningkatan profesionalitas SDM; dan
- (v) Peningkatan implementasi Reformasi Reformasi dan SAKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen Bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) dan penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah mengacu pada Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2020-2024. Visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan strtategis adalah sebagai berikut.

VISI

Mendukung terwujudnya visi Badan Ideologi Pancasila yaitu :

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang andal, profesional, inovatif, berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden di bidang pembinaan ideologi Pancasila untuk mewujudkan visi dan misi Presiden : “ Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandasan Gotong Royong”.

MISI

Mendukung terwujudnyanya misi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yaitu :
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mewujudkan misi Presiden dengan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan ideologi Pancasila sehingga

dengan nilai-nilai Pancasila teraktualisasikan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta praktik kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

TUJUAN

Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

SASARAN INDIKATOR

Sasaran Program dan Kegiatan beserta indikator kinerja Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah sebagai berikut.

Gambar 3. Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Rencana Strategis Settama BPIP 2020-2024

SASARAN dan INDIKATOR	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik					
- Nilai Reformasi Birokrasi	81	81,5	82	82,5	83
- Indeks Sistem MERIT	0,61	0,65	0,7	0,75	0,81
- Opini Laporan Keuangan oleh BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
- Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB
- Indeks Profesionalisme ASN	81	81,5	82	82,5	83
- Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	90%	90%	90%	90%
Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan, dan Kinerja					
Terlaksananya koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan Akuntabilitas					
- Layanan Perencanaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
- Opini Laporan Keuangan oleh BPK/ Layanan Manajemen Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
- Nilai SAKIP/ Layanan Pemantauan dan Evaluasi	BB	BB	BB	BB	BB
Pelaksanaan Manajemen Hukum dan Organisasi					
Terlaksananya koordinasi dan penyusunan produk hukum, dokumentasi dan informasi hukum, dan pembinaan penataan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi					
- Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan produk hukum, organisasi dan tata laksana, dan reformasi birokrasi	100%	100%	100%	100%	100%
- Nilai Reformasi Birokrasi	81	81,5	82	82,5	83
- Layanan Hukum	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
- Layanan Manajemen Organisasi	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
- Layanan Reformasi Birokrasi	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

SASARAN dan INDIKATOR	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pelaksanaan Manajemen Sumber Daya Manusia, BMN, dan Ketatausahaan					
Terlaksananya koordinasi pengelolaan barang milik negara, pembinaan mental sumber daya manusia, pengelolaan karier dan kinerja sumber daya manusia, kerumahtanggaan					
- Persentase kepuasan unit kerja terhadap pengelolaan Barang Milik Negara, pengadaan barang/jasa pemerintah, perencanaan dan pengelolaan karier dan kinerja sumber daya manusia, kerumahtanggaan, dan keprotokolan umum, pengamanan, dan kearsipan yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%
- Indeks Merit	0,61	0,65	0,7	0,75	0,81
- Indeks Profesionalisme ASN	81	81,5	82	82,5	83
- Layanan manajemen Sumber Daya Manusia	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
- Layanan manajemen Barang Milik Negara	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
- Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
- Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
- Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
Pelaksanaan Manajemen Fasilitas Dewan Pengarah dan Ketenagaaahlian					
Terlaksananya dukungan teknis dan administrasi bagi Dewan Pengarah, Staf Khusus Dewan Pengarah, Dewan Pakar, dan Kelompok Ahli					
- Persentase tingkat kepuasan terhadap dukungan teknis dan administrasi bagi Dewan Pengarah, Staf Khusus Dewan Pengarah, Dewan Pakar, dan Kelompok Ahli yang diberikan	100%	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan Manajemen Pengawasan Internal					
Terlaksananya pengawasan intern di lingkungan BPIP					
- Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
- Nilai Tingkat Maturitas SPIP (Skala 1 s.d. 5)	2	2,25	2,5	2,75	3
Pelaksanaan Manajemen Data dan Informasi					
Terlaksananya pengelolaan data dan informasi dan pengembangan Sistem informasi berbasis kemajuan teknologi dalam penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila					
- tingkat Maturitas SPBE/Layanan data dan informasi	4	4	4	4	4

PETA STRATEGIS

Gambar 4. Peta Strategis Settama BPIP



2.2 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020

Alokasi anggaran Sekretariat Utama Badan Pembinaan dan Ideologi Pancasila tercakup pada Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya dengan sasaran program terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sasaran program ini juga secara langsung menjadi sasaran strategis tingkat instansi. Alokasi anggaran untuk kegiatan layanan yang dilakukan oleh Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut.

Gambar 5. Alokasi Anggaran Settama BPIP TA 2020

UNIT ORGANISASI/LAYANAN	ANGGARAN TA 2020 (Rp)	
Dukungan Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Administratif dan Teknis kepada Seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila		105.625.414.000
BIRO FASILITASI DEWAN PENGARAH DAN KETENAGAAHLIAN (2%)		1.700.000.000
Layanan Fasilitasi Dewan Pengarah, Staff Khusus Dewan Pengarah, Dewan Pakar dan Kelompok Ahli	1.700.000.000	
BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA (86%)		90.325.414.000
Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)	5.065.995.000	
Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN)	709.100.000	
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4.160.830.000	
Layanan Umum	800.649.000	
Layanan Perkantoran	79.588.840.000	
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN (4%)		4.600.000.000
Layanan Perencanaan	2.200.000.000	
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	850.000.000	
Layanan Manajemen Keuangan	1.550.000.000	
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI (2%)		2.000.000.000
Layanan Hukum	1.200.000.000	
Layanan Manajemen Organisasi	400.000.000	
Layanan Reformasi Birokrasi	400.000.000	
PUSAT DATA DAN INFORMASI (6%)		6.000.000.000
Layanan Data dan Informasi	6.000.000.000	
BIRO PENGAWASAN INTERNAL (1%)		1.000.000.000
Layanan Audit Internal	1.000.000.000	

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berisikan penugasan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target.

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran program Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila lebih optimal, terdapat beberapa indikator kinerja yang disesuaikan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

- Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel serta Pelayanan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Berkualitas Melalui Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Semula	Menjadi
1. Tingkat Kepuasan Terhadap Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya di Lingkungan BPIP 2. Kualitas Laporan Keuangan BPIP Berdasarkan Opini BPK	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Indeks Sistem MERIT 3. Opini Laporan Keuangan oleh BPK 4. Nilai SAKIP 5. Indeks Profesionalisme ASN 6. Indeks Kepuasan masyarakat

Berikut adalah sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai dalam tahun 2020 sebagai berikut :

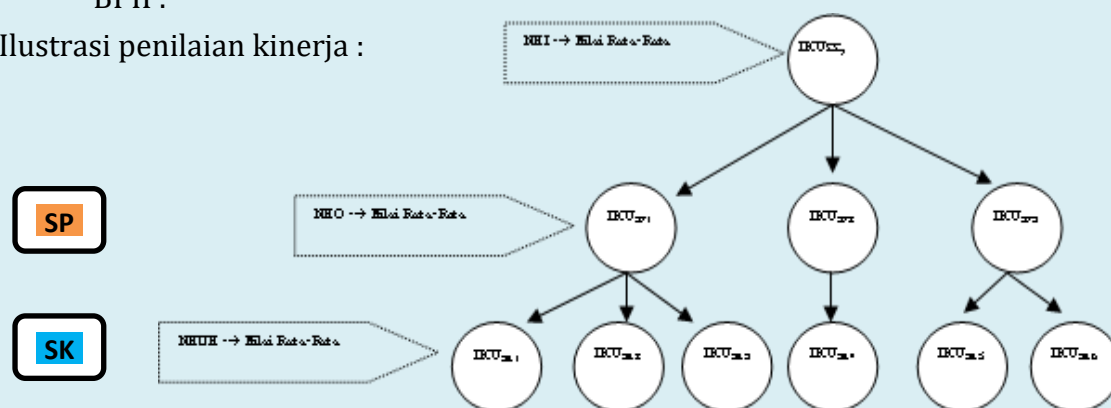
Sasaran Strategis	Indikator	Target
Terwujudnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel serta Pelayanan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Berkualitas Melalui Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Indeks Sistem MERIT 3. Opini Laporan Keuangan oleh BPK 4. Nilai SAKIP 5. Indeks Profesionalisme ASN 6. Indeks Kepuasan Masyarakat	81 0,61 WTP BB 81 90%

2.4 Pengukuran Kinerja

Ruang lingkup pengelolaan kinerja meliputi pengumpulan data kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja, pengukuran data kinerja, pelaporan kinerja, dan monitoring dan evaluasi. Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja pada tingkat Badan, Unit Organisasi, dan Unit Kerja melakukan koordinasi pengelolaan data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja. Pengumpulan dan penyampaian laporan data kinerja pada masing-masing tingkatan dan unit kerja dikoordinasikan oleh : (i) *KPIs Manager* tingkat BPIP; (ii) *KPIs Manager* tingkat Organisasi (eselon I); dan (iii) Koordinator Capaian IKU pada tingkat Unit Kerja (eselon II). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun berjalan;
2. Penilaian kinerja dilakukan secara berjenjang sesuai dengan *cascading* indikator kinerja, yaitu:
 - a. Nilai Kinerja Unit Kinerja (NKUK) adalah rerata nilai kinerja dari indikator kinerja Tingkat Eselon II.
 - b. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah rerata nilai kinerja dari indikator kinerja Tingkat Eselon I.
 - c. Nilai Kinerja Instansi (NKI) rerata nilai kinerja dari indikator kinerja BPIP.

Ilustrasi penilaian kinerja :



Kriteria Status Nilai Capaian Kinerja di lingkungan BPIP, antara lain adalah:

Nilai (n)	kriteria	status
$n \geq 100$	baik	hijau
$80 \leq n < 100$	cukup	kuning
$n < 80$	kurang	merah

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan analisis realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2020. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya.

3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. 5 (lima) target kinerja Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2020 sudah tercapai, dan masih ada 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat yang belum dilaksanakan pada Tahun 2020, hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Gambar 6. Tabel Indikkator Kinerja Utama Settama Tahun BPIP 2020

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
Terwujudnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel serta Pelayanan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Berkualitas Melalui Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Nilai Reformasi Birokrasi	81	44,14
	2. Indeks Sistem MERIT	0,61	0,8
	3. Opini Laporan Keuangan oleh BPK	WTP	WTP
	4. Nilai SAKIP	BB	B
	5. Indeks Profesionalisme ASN	81	30
	6. Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	N/A

3.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Evaluasi dan Analisa capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja berdasarkan Sasaran dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran :

Terwujudnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel serta Pelayanan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Berkualitas Melalui Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan peran Sekretariat Utama dinyatakan efektif dan efisien ditandai dengan capaian nilai kelembagaan yang diukur dengan 6 (enam) indikator yaitu sebagai berikut :

1. Nilai Reformasi Birokrasi
2. Indeks Sistem Merit
3. Opini Laporan Keuangan oleh BPK
4. Nilai SAKIP
5. Indeks Profesionalisme ASN
6. Indeks Kepuasan Masyarakat

3.2.1 Nilai Reformasi Birokrasi

Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melaksanakan perbaikan tata kelola dalam menjalankan tugas pokok fungsinya sehingga terwujud organisasi yang efektif, efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Reformasi Birokrasi menjadi kebutuhan dalam rangka terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, BPIP telah menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi di lingkungan BPIP dalam *Roadmap* Reformasi Birokrasi BPIP Tahun 2020-2024.

Implementasi Reformasi Birokrasi tahun 2020 dimulai dengan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi BPIP berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pembinaan

Ideologi Pancasila. Kemudian telah ditetapkan juga *Quick Win* Reformasi BPIP Tahun 2020 yaitu “Rekomendasi penyelarasan Nilai Pancasila secara elektronik dalam kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan” berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 72 Tahun 2020.

Selama periode tahun 2020, Tim Reformasi Birokrasi telah menggerakkan seluruh elemen BPIP untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPIP. Hal ini dapat dinilai dari capaian kinerja berupa terpenuhinya *Quick Win* dan persentase pelaksanaan rencana aksi 8 (delapan) area perubahan yang mencapai 78,075%. Capaian tersebut menunjukkan komitmen BPIP dalam melakukan perubahan besar paradigma, budaya kerja, dan tata kelola pemerintahan di lingkungan BPIP yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, berkesinambungan, dan terpadu. Tahun 2021, diharapkan Reformasi Birokrasi BPIP dapat dilaksanakan secara lebih optimal yang didasarkan pada perencanaan program dan kegiatan yang implementatif sampai dengan level unit kerja.

Gambar 7. Tabel Capaian Kinerja Pelaksanaan RB BPIP Berdasarkan Rencana Aksi Area Perubahan

Kelompok Kerja Area Perubahan	Capaian Kinerja (%)
Program Manajemen Perubahan	70
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	87
Program Penataan dan Penguatan Organisasi	50
Program Penataan Tata Laksana	80
Program Penataan Sistem Manajemen SDM	91,6
Program Penguatan Pengawasan	80
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	86
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	80
Persentase rata-rata	78,075

Tahun 2020 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum melakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPIP. BPIP di kategorikan sebagai lembaga baru yang masih dalam tahap pembangunan dan pembangunan. Dari Penilaian Mandiri atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

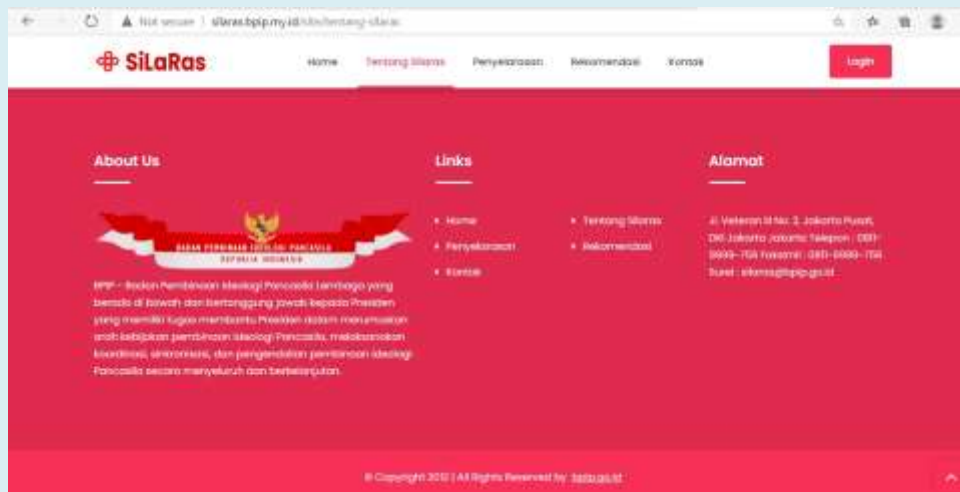
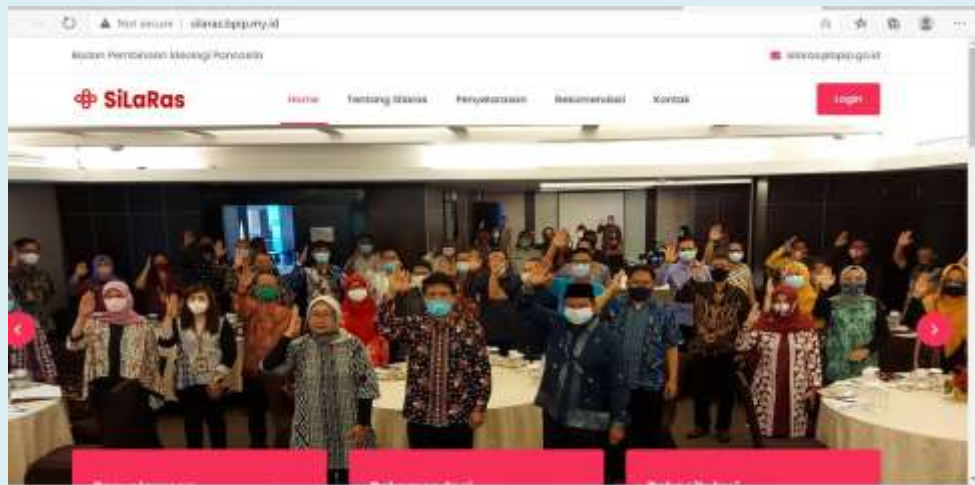
diperoleh nilai sebesar 44,14. Rncian penilaian pada aplikasi PMPRB adalah sebagai berikut:

Gambar 8. Tabel Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Penilaian		Bobot	Indeks RB	
			2019	2020
A.	PENGUNGKIT			
	I. PEMENUHAN (20)	20,00	0,00	16,56
	1 MANAJEMEN PERUBAHAN	2,00		0,54
	2 DEREGULASI KEBIJAKAN	2,00		0,83
	3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	3,00		0,50
	4 PENATAAN TATALAKSANA	2,50		1,61
	5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	3,00		4,24
	6 PENGUATAN AKUNTABILITAS	2,50		2,00
	7 PENGUATAN PENGAWASAN	2,50		4,38
	8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	2,50		2,46
	II. HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN (10)	10,00	0,00	0,00
	i. Kualitas Pengelolaan Arsip	1,00		0,00
	ii. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,00		0,00
	iii. Kualitas Pengelolaan Keuangan	1,00		0,00
	iv. Kualitas Pengelolaan Aset	1,00		0,00
	v. Merit System	1,00		0,00
	vi. ASN Profesional	1,00		0,00
	vii. Kualitas Perencanaan	1,00		0,00
	viii. Maturitas SPIP	1,00		0,00
	ix. Kapabilitas APIP	1,00		0,00
	x. Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai Undang-undang 25 Tahun 2009	1,00		0,00
	III. REFORM (30)	30,00	0,00	27,58
	1 MANAJEMEN PERUBAHAN	3,00		1,93
	2 DEREGULASI KEBIJAKAN	3,00		1,00
	3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	4,50		0,50
	4 PENATAAN TATALAKSANA	3,75		0,33
	5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	4,50		1,50
	6 PENGUATAN AKUNTABILITAS	3,75		19,19
	7 PENGUATAN PENGAWASAN	3,75		1,88
	8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	3,75		1,25

TOTAL PENGUNGKIT				60,00	0,00	44,14
B.	HASIL (40)					
	1	AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN (10)		10,00	0,00	74,74
		i.	Opini BPK (3)	3,00	0,00	9,00
		ii.	Nilai SAKIP (7)	7,00		65,74
	2	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)		10,00	0,00	0,00
		Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)		10,00		0,00
	3	PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10)		10,00	0,00	0,00
		Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)		10,00		0,00
	4	KINERJA ORGANISASI (10)		10,00	0,00	0,00
		i.	Capaian Kinerja	5,00		0,00
		ii.	Kinerja Lainnya	2,00		0,00
		iii.	Survei Internal Organisasi	3,00		0,00
TOTAL HASIL				40,00	0,00	0,00
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI				100,00	0,00	44,14

Kilas Peristiwa Strategis Reformasi Birokrasi :



Quick Win Reformasi BPIP Tahun 2020 yaitu “Rekomendasi penyelarasan Nilai Pancasila secara elektronik dalam kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan”



Pembahasan Quik Win Reformasi Birokrasi: Perumusan Data Dukung Area Perubahan Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



Penyusunan SOP di lingkungan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Badan Pembinaan Ideologi Pancasila



Penyusunan Peta Proses Bisnis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila



Rapat Finalisasi Evaluasi SAKIP Unit Kerja 2019 di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)



Pemutakhiran Daya Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi, Capaian Kinerja Pelaksanaan Quick Win, dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPIP Sampai Dengan November 2020 di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila



Penyematan PIN Agent of Change pada kegiatan Rapat Koordinasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi dan Renstra BPIP, tanggal 7 s.d. 8 Oktober 2020





Penandatanganan Pakta Pencanaan Zona Integritas pada kegiatan Rapat Koordinasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi dan Renstra BPIP, tanggal 7 s.d 8 Oktober 2020

3.2.2 Indeks Sistem MERIT

Sistem Merit adalah kebijakan dalam Manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa mempertimbangkan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan atau kondisi kecacatan.

Manfaat penerapan system merit adalah :

1. Memberikan jaminan karir ASN
2. Mendorong peningkatan kinerja ASN
3. Mendorong pengembangan kompetensi ASN
4. Melindungi ASN dari intervensi politik
5. Menghindari Potential Lost dalam pengelolaan pegawai

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020 telah melakukan pengukuran mandiri terhadap Indeks Sistem Merit dengan hasil sebagai berikut :

1. Aspek Perencanaan dengan indikator penilaian :
 - Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan PPK. Bobot indikator 2.5 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh skor 4.
 - Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan up to date yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi. Bobot indikator 2.5 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh skor 4.
 - Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pension dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja dan Pendidikan terakhir. Bobot indikator 2.5 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh skor 4.
 - Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan. Bobot indikator 2.5 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh skor 4
2. Pengadaan dengan indikator penilaian :
 - Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan. Bobot indikator 2 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh skor 4.
 - Ketersediaan kebijakan internal (Permen/Perka Lembaga/Pergub/Perbup/Perwal) terkait pengadaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif. Bobot indikator 2 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh skor 4.
 - Pelaksanaan penerimaan ASN dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif. Bobot indikator 2 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh skor 4.

- Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS. Bobot indikator 2 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh skor 4.
 - Persentase CPNS yang diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar. Bobot indikator 2 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh skor 4.
3. Pengembangan karir dengan indikator penilaian :
- Ketersediaan standar kompetensi jabatan (Manajerial, teknis dan social kultural) untuk setiap jabatan. Bobot indikator 5 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh skor 4.
 - Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi. Bobot indikator 5 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh skor 4.
 - Ketersediaan talent pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja. Bobot indikator 5 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh skor 0.
 - Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi. Bobot indikator 2.5 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh skor 0.
 - Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai. Bobot indikator 2.5 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh skor 4.
 - Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja. Bobot indikator 2.5 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh skor 4.
 - Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN. Bobot indikator 2.5 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh skor 0.

- Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan. Bobot indikator 2.5 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh skor 4.
 - Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai. Bobot indikator 2.5 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh skor 4.
 - Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring. Bobot indikator 2.5 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh skor 4.
4. Promosi dan mutasi dengan indikator penilaian :
- Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen/Perka Lembaga/Pergub/Perbup/Perwal) tentang pola karir. Bobot indikator 5 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh skor 0.
 - Ketersediaan kebijakan internal (Permen/Perka Lembaga/Pergub/Perbup/Perwali) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi. Bobot indikator 2.5 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh skor 4.
 - Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi (Administrator dan Pengawas secara terbuka dan kompetitif. Bobot indikator 2.5 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh skor 4.
5. Manajemen kinerja dengan indikator penilaian :
- Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi. Bobot indikator 5 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh skor 4.
 - Penggunaan metode penilaian kinerja yang objektif. Bobot indikator 5 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh skor 4.
 - Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak

kinerja. Bobot indikator 2.5 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh skor 0.

- Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi. Bobot indikator 5 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh skor 4.
 - Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir. Bobot indikator 2.5 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh skor 3.
6. Penggajian, penghargaan dan disiplin dengan indikator penilaian :
- Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja. Bobot indikator 2.5 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh skor 4.
 - Ketersediaan kebijakan internal (Permen/Pergub/Perbup/Perwali) untuk memberi penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial terhadap pegawai berprestasi. Bobot indikator 2.5 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh skor 0.
 - Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya. Bobot indikator 2.5 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh skor 4.
 - Pengelolaan data terkait pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai. Bobot indikator 2 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh skor 2.
7. Perlindungan dan pelayanan dengan indikator penilaian :
- Kebijakan perlindungan untuk pegawai (diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pension, yang diselenggarakan secara nasional). Bobot indikator 2 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh skor 4.

- Penyediaan fasilitas untuk memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi. Bobot indikator 2 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh skor 4.
8. Sistem informasi dengan indikator penilaian :
- Pembangunan system informasi kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan system penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai. Bobot indikator 2 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh skor 3.
 - Penerapan e-performance yang terintegrasi dengan system informasi kepegawaian yang berbasis online. Bobot indikator 1 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh skor 0.
 - Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian. Bobot indikator 1 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh skor 4.
 - Pembangunan dan penggunaan assessment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi. Bobot indikator 2 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh skor 4.

Hasil penilaian keseluruhan aspek di atas diperoleh Indeks Merit Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020 sebesar 316.5 (*Baik*).

Klasifikasi hasil penilaian tersebut masuk pada kategori, yaitu :

1. *Kategori I Buruk* (Warna Merah) dengan skor nilai (100-174) indeks (0,2-0,4), dibimbing intensif agar memenuhi persyaratan.
2. *Kategori II Kurang* (Warna Kuning) dengan skor nilai (175-249) indeks (0,41-0,6), dibimbing agar memenuhi persyaratan.
3. *Kategori III Baik* (Warna Hijau) dengan skor nilai (250-324) indeks (0,61-0,8), diberikan kesempatan untuk mengisi JPT dan talent pool namun dengan persyaratan tertentu dan pengawasan serta dievaluasi setiap tahun.
4. *Kategori IV Sangat Baik* (Warna Biru) dengan skor nilai (325-400) indeks (0,81-1), dapat diberikan kesempatan untuk mengisi JPT dan talent pool serta dievaluasi 2 tahun sekali.

Berdasarkan kategori hasil penilaian penerapan Sistem Merit Badan Pembinaan Ideologi Pancasila termasuk *kategori III-Baik (warna Hijau)* dengan nilai 316.5, kelompok indek 0,61-0,8.

3.2.3 Opini Laporan Keuangan oleh BPK

Opini BPK merupakan pernyataan Profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Dalam melaksanakan audit atas Laporan Keuangan, BPK memberikan 5 jenis Opini sebagai berikut:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian.
2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal.
3. Opini Wajar Dengan Pengecualian.
4. Opini Tidak Wajar.
5. Opini Tidak Memberikan Opini.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. BPK telah menetapkan sejumlah kriteria untuk bisa mencapai predikat WTP yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Pada tahun Anggaran 2020, Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menargetkan Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Badan

Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2019. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dengan nomor: 46A/HP/XVI/5/2020 tanggal 15 Mei 2020 terhadap Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2019 mendapat Opini “WTP”. Perolehan Opini WTP bukanlah tujuan akhir pengelolaan keuangan negara. Keuangan Negara memiliki peranan dan kontribusi penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, menciptakan keadilan social, dan pemerataan yang semakin kuat.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dan akan dilakukan untuk mempertahankan Opini WTP diantaranya meliputi:

1. Tindaklanjut hasil temuan tahun sebelumnya.
2. Perbaiki pengelolaan keuangan, menggunakan aplikasi (SIMPATI) Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran Terintegritas.
3. Perbaiki Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
4. Perbaiki penyajian laporan keuangan dan meminimalisasi penyimpangan pelaksanaan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
5. Penguatan pengendalian internal melalui penyusunan manajemen risiko sebagai bagian penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPI) di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Untuk keandalan pengendalian internal telah mendapatkan penilaian dari BPKP.

Kilas Peristiwa Strategis Opini Laporan Keuangan oleh BPK :



3.2.4 Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 dinyatakan Penyelenggaraan SAKIP meliputi komponen-komponen sebagai berikut :

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Pengukuran Kinerja
4. Pengelolaan Data Kinerja
5. Pelaporan Kinerja
6. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Nilai akuntabilitas kinerja merupakan nilai/hasil dari evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan instansi pemerintah. Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum melakukan Evaluasi SAKIP di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atas implementasi Tahun 2019.

Hasil evaluasi mandiri implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Biro Pengawasan Internal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh nilai **68.8 (B) Baik** dengan rincian nilai per komponen adalah berikut ini.

Gambar 9. Tabel Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan SAKIP

No	Komponen Penilaian	BOBOT	Nilai Evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,98
2.	Pengkuran Kinerja	25	14,42
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,39
4.	Evaluasi Kinerja	10	7,26
5.	Pencapaian Sasaran	20	10,79
	Total Nilai	100	68.8

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diantaranya :

1. Penyusunan Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024.
 - Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2020-2024;
 - Penyusunan dan Pembahasan Renstra 2020-2024 dengan mengacu pada RPJMN 2020-2024;
 - Rapat Pleno Pimpinan Finalisasi Renstra Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2020-2024;
 - Proses penetapan Renstra 2020-2024 menjadi peraturan BPIP;
 - Sosialisasi Renstra Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2020-2024 kepada Pegawai/Pejabat BPIP.
2. Penyusunan Peta Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Internalisasi Peta Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
3. Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
 - Permintaan masukan informasi kinerja kepada unit kerja di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - Pembahasan Finalisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila hingga cascading ke level eselon II;
 - Penetapan surat keputusan IKU di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
4. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2020.

- Penyusunan Perjanjian Kinerja 2020 dari tingkat Kepala BPIP hingga Jabatan Fungsional Umum (Pelaksana);
 - Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2020 dari tingkat Kepala BPIP hingga Jabatan Fungsional Umum (Pelaksana);
 - Penyusunan Rencana Aksi Kepala BPIP , Eselon I dan Eselon II;
 - Penyusunan Cascading Kinerja hingga jabatan Fungsional Umum/Pelaksana dengan Pohon Kinerja.
5. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Kinerja
- Rapat pembahasan/permintaan masukan atas draft Pedoman Pengelolaan Kinerja kepada unit kerja di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - Finalisasi Pedoman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - Penetapan Pedoman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
6. Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Kinerja.
Pembahasan kerangka aplikasi dan proses pengadaan aplikasi.
7. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja (Pengelolaan dan Pengukuran Kinerja).
Penyusunan Laporan Kinerja BPIP, e-monev Bappenas, e-monev SMART DJA.

Kilas Peristiwa Strategis Implementasi SAKIP :





3.2.5 Indeks Profesionalisme ASN

Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Pengukuran ini dimaksud sebagai acuan instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dengan tujuan agar Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dapat melakukan pengukuran Indeks Profesionalisme ASN secara benar. Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya.

Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalisme ASN mencakup :

1. Dimensi Kualifikasi

Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi Pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% dari keseluruhan pengukuran.

Indikator yang digunakan adalah jenjang Pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS, meliputi :

- a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga) dengan bobot nilai sebesar 25;
- b. Pendidikan S-2 (Strata Dua) dengan bobot nilai sebesar 20;
- c. Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat) dengan bobot nilai sebesar 15;
- d. Pendidikan D-III (Diploma Tiga) dengan bobot nilai sebesar 10;
- e. Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/ sederajat dengan bobot nilai sebesar 5;
- f. Dibawah SLTA dengan bobot nilai sebesar 1;

2. Dimensi Kompetensi

Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% dari keseluruhan pengukuran.

Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas:

a. Diklat Kepemimpinan

Instrumen pengukuran pada Diklat Kepemimpinan bobot penilaiannya sebagai berikut:

- Bobot nilai sebesar 15 bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang di duduki;
- Bobot nilai sebesar 0 bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang belum mengikuti Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki.

b. Diklat Fungsional

Instrumen pengukuran pada Diklat Fungsional bobot penilaiannya sebagai berikut:

- Bobot nilai sebesar 15 bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki;
- Bobot nilai sebesar 0 bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan belum mengikuti Pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki.

c. Diklat Teknis

Instrumen pengukuran pada diklat teknis paling sedikit 20 JP dengan bobot penilaian sebagai berikut:

- Bobot nilai sebesar 15 bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;
- Bobot nilai sebesar 0 bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti Pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;
- Bobot nilai sebesar 22,5 bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 tahun terakhir;
- Bobot nilai sebesar 0 bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 tahun terakhir.

d. Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya.

Instrumen Pengukuran pada seminar/workshop/magang/kursus/sejenisnya dengan bobot nilai sebagai berikut:

- Bobot nilai 10 bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti seminar/workshop/magang/kursus/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 tahun terakhir;
- Bobot nilai sebesar 0 bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang belum mengikuti seminar/workshop/magang/kursus/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 tahun terakhir;

- Bobot nilai sebesar 17,5 bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti seminar/workshop/magang/kursus/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 tahun terakhir;
- Bobot nilai 0 bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti seminar/workshop/magang/kursus/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 tahun terakhir. Keikutsertaan dalam seminar/workshop/magang/kursus/sejenisnya tersebut dibuktikan dengan sertifikat/surat tugas dan sejenisnya.

3. Dimensi Kinerja

Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% dari keseluruhan pengukuran.

Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup sebagai berikut :

- a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- b. Perilaku Kerja Pegawai (PKP).

Instrumen pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut :

- Bobot nilai sebesar 30 bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 91 sampai dengan 100 dengan kriteria baik dalam 1 tahun terakhir;
- Bobot nilai sebesar 25 bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 76 sampai dengan 90 dengan kriteria baik dalam 1 tahun terakhir;
- Bobot nilai sebesar 15 bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 61 sampai dengan 75 dengan kriteria cukup dalam 1 tahun terakhir;

- Bobot nilai sebesar 5 bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 51 sampai dengan 60 dengan kriteria sedang dalam 1 tahun terakhir;
- Bobot nilai sebesar 1 bagi PNS yang memiliki nilai kinerja 50 ke bawah dengan kriteria kurang dalam 1 tahun terakhir.

4. Dimensi Disiplin

Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% dari keseluruhan pengukuran.

Indikator yang digunakan yaitu data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima yang mencakup :

- a. Hukuman disiplin ringan;
- b. Hukuman disiplin sedang;
- c. Hukuman disiplin berat.

Instrumen pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut :

- Bobot nilai sebesar 5 bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- Bobot nilai sebesar 3 bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
- Bobot nilai sebesar 2 bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;
- Bobot nilai sebesar 1 bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Hukuman disiplin yang di atas yaitu yang telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 tahun terakhir.

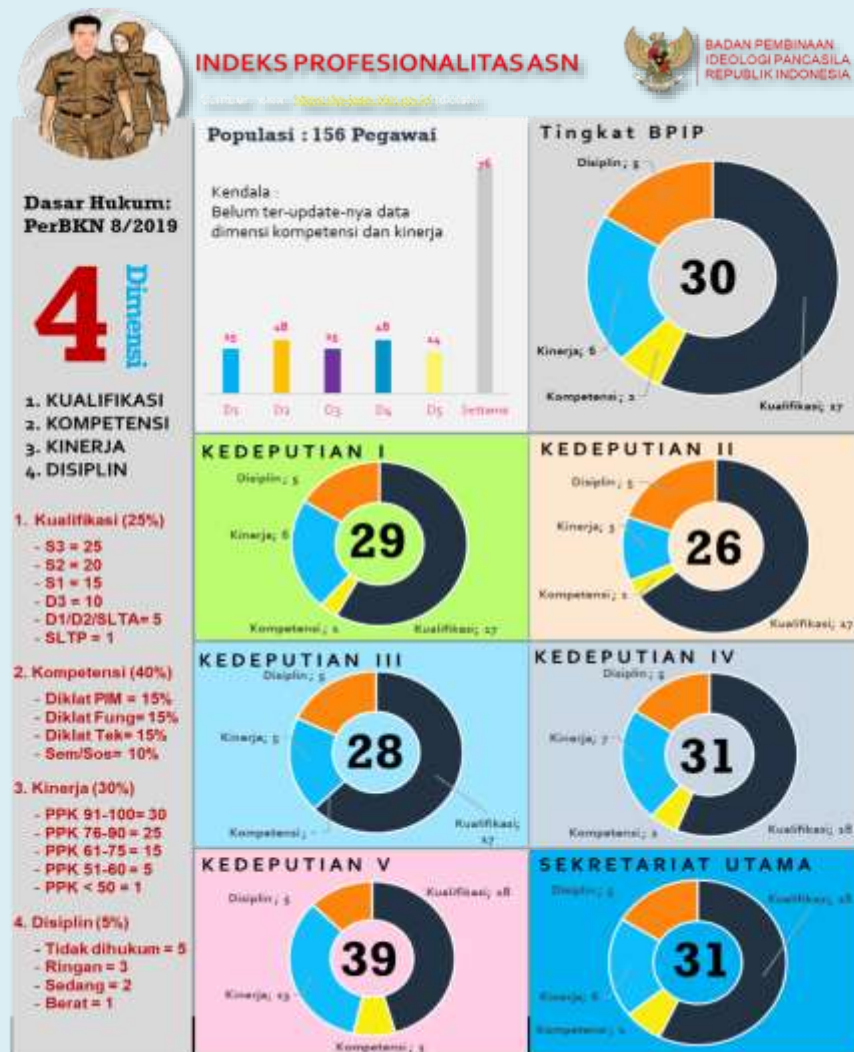
Kategori tingkat profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut :

1. Sangat tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91-100;
2. Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81-90;
3. Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71-80;

4. Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61-70;
5. Sangat rendah yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah.

Kapasitas Sumber Daya Manusia Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tercermin dari indeks profesionalitas yang dimonitor oleh Badan Kepegawaian Negara. Hingga November 2020, tingkat profesionalitas Sumber Daya Manusia Badan Pembinaan Ideologi Pancasila baru mencapai angka 30. Hasil perhitungan tersebut berdasarkan data yang diolah <https://ip-jasn.bkn.go.id> milik Badan Kepegawaian Negara. Masih rendahnya indeks profesionalitas ASN BPIP adalah karena belum dilakukan pemutahiran data kompetensi dan data kinerja ASN di lingkungan BPIP. Grafik Indeks Profesionalitas ASN BPIP adalah sebagai berikut:

Gambar 10. Indeks Profesionalitas ASN BPIP



3.2.6 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang memberikan panduan terkait aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penilaian penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu aspek dalam penilaian tersebut adalah kebijakan pelayanan. Melalui survei kepuasan masyarakat penyelenggaraan negara mampu memutuskan hal-hal apa saja yang penting untuk segera ditindaklanjuti. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggaraan negara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Indikator IKM belum dapat dicapai Tahun 2020. BPIP yang secara efektif mandiri secara kelengkapan sumberdaya manusia dan keuangan di akhir tahun 2019, masih baru tahap membangun dan mengembangkan Lembaga melalui pelaksanaan tugas dan fungsi. Untuk itu pelayanan kepada masyarakat belum maksimal dan menyebar luas. Sebagai tahapan menuju pada kualitas pelayanan BPIP yang baik, tahun 2020 dilakukan penyusunan dan memetakan pedoman standar pelayanan BPIP yang dimotori oleh Tim Reformasi Birokrasi Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Tahapan pencapaian indikator nilai IKM adalah sebagai berikut.



3.2.7 Kinerja Layanan Kesekretariatan (Perspektif Proses Internal)

Indikator kinerja masing-masing layanan pada program dukungan manajemen adalah terpenuhinya layanan sesuai tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama BPIP. Ruang lingkup capaian mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan BPIP yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah sebagai berikut.

Layanan Fasilitas Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian

1. Notulensi Rapat Pimpinan dan notulensi Rapat Pleno bagi unsur pimpinan di lingkungan BPIP. Notulensi yang diberikan berupa ringkasan notulensi dan verbatim;
2. Pendampingan disetiap kegiatan yang dihadiri oleh Dewan Pengarah dan Staf Khusus Dewan Pengarah. Pendampingan tersebut merupakan pendampingan protokoler;
3. Membuat ringkasan berita yang dihadiri Staf Khusus Dewan Pengarah;
4. Dukungan administrasi kerumahtanggaan Dewan Pengarah dan Staf Khusus Dewan Pengarah.

Layanan Hukum dan Organisasi

Penyusunan Produk Hukum:

- Peraturan Presiden tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional
- Rancangan Peraturan Presiden tentang Paskibraka
- Rancangan Peraturan BPIP tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan BPIP
- Rancangan Peraturan BPIP tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai BPIP
- Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020 - 2024
- Rancangan Peraturan BPIP tentang Indikator Nilai Pancasila
- Rancangan Peraturan BPIP tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan BPIP

- Rancangan Peraturan BPIP tentang Pedoman Pengukuran PIP
- Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan atas Peraturan BPIP No. 2 Tahun 2018 tentang Kelompok Ahli
- Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan PIP
- Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan BPIP
- Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelarasan Nilai Dasar Pancasila dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Rancangan Peraturan Lembaga Nonstruktural, dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang Dibentuk di Daerah
- Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi terhadap Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Pancasila
- Rancangan Peraturan BPIP tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower
- Dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan BPIP
- Rancangan Peraturan BPIP tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan BPIP
- Rancangan Peraturan BPIP tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPIP
- Rancangan Peraturan BPIP tentang Jaringan dan Dokumentasi Hukum BPIP
- Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar Pelayanan Publik
- Rancangan Peraturan BPIP tentang Layanan Informasi Publik
- Peraturan Organisasi Paskibraka
- Produk Hukum Lainnya (Non Peraturan Perundang-undangan): 54 Keputusan, 14 Surat edaran, 56 Nota Kesepahaman, dan 11 Perjanjian Kerjasama

Penetapan, Pengundangan, dan Pendokumentasian Produk Hukum :

- Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020 - 2024;
- Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan PIP;
- Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan BPIP;
- Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelarasan Nilai Dasar Pancasila dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Rancangan Peraturan Lembaga Nonstruktural, dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang Dibentuk di Daerah;
- Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi terhadap Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Pancasila;
- Peraturan BPIP Nomor 6 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPIP;
- Peraturan BPIP Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan BPIP;
- Peraturan BPIP Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai BPIP;
- Peraturan BPIP Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan BPIP;
- Pembangunan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPIP (JDIH BPIP);
- Pemrakarsa Peraturan BPIP Nomor 6 Tahun 2020 tentang JDIH BPIP;
- Terintegrasinya website JDIH BPIP dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

Organisasi dan Tata Laksana:

- Draft Rancangan Revisi Struktur Organisasi BPIP
- Keputusan Sekretaris Utama BPIP Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan BPIP;

- Keputusan Kepala BPIP Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tim RB di Lingkungan BPIP Tahun 2020;
- Keputusan Kepala BPIP Nomor 82 Tahun 2020 tentang Peta Jalan(Road Map) Reformasi Birokrasi BPIP 2020 – 2024;
- Surat Keputusan Sekretaris Utama Nomor 43 tahun 2020 tentang Tim PMPRB BPIP;
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPIP sampai dengan 31 Agustus 2020;
- Keputusan Kepala BPIP Nomor 81 Tahun 2020 tentang Agen Perubahan RB BPIP;
- Penetapan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi;
- Keputusan Kepala BPIP Nomor 79 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis BPIP;
- Keputusan Kepala BPIP Nomor 80 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan BPIP;
- Dokumen Pencanaan Zona Integritas BPIP;
- Dokumen dan Data dukung lainnya pada 8 area perubahan Reformasi Birokrasi;
- Laporan Kinerja Pokja Manajemen Perubahan;
- Laporan Kinerja Pokja Penataan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan;
- Laporan Kinerja Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi;
- Laporan Kinerja Pokja Penataan Tata Laksana;
- Laporan Kinerja Pokja Penataan SDM;
- Laporan Kinerja Pokja Penguatan Akuntabilitas;
- Laporan Kinerja Pokja Penguatan Pengawasan;
- Laporan Kinerja Pokja Kualitas Pelayanan Publik; dan
- Laporan Kinerja Capaian Quick wins RB tahun 2020.

Layanan Perencanaan, Keuangan, dan Akuntabilitas Kinerja

- Layanan perbankan berbasis non-tunai (cash management system);
- Layanan verifikasi pembayaran dan perbendaharaan;
- Penyusunan Laporan Keuangan BPIP TA 2019 dan Interim TA 2020;

- Pemutakhiran Kerangka Penganggaran Jangka Menengah (KPJM) TA 2021;
- Penyusunan Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024;
- Revisi DIPA BPIP TA 2020 dalam rangka penghematan anggaran dalam rangka penanggulangan wabah COVID-19 dan dalam rangka penyelesaian tunggakan pembayaran kegiatan TA 2019, dan Revisi regular;
- Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) BPIP Tahun 2021;
- Penyusunan Perjanjian Kinerja 2020, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, Pohon Kinerja, dan Laporan Kinerja 2019; dan
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dengan menggunakan Aplikasi e-monev Bappenas dan SMART-DJA.

Layanan Umum dan Sumber Daya Manusia

- Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama;
- Pemberian penghargaan dan penjatuhan hukuman disiplin;
- Seleksi calon pegawai negeri sipil BPIP, dan pegawai tidak tetap;
- Penyusunan standar kompetensi jabatan;
- Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Nasional Tingkat I, II, dan Pengawas;
- Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian;
- Penyusunan Peta Jabatan;
- Administrasi Kenaikan pangkat dan gaji berkala;
- Tata kelola gaji dan tunjangan kinerja pegawai;
- Pencegahan penularan Covid-19 melalui pengadaan rapid test dan swab test, pemberian dan penyemprotan disinfektan di lingkungan BPIP, pemberian masker, vitamin c, dan hand sanitizer;
- Pemenuhan kebutuhan keperluan perkantoran dan barang persediaan dan dicatat dan diinput menggunakan aplikasi SIMAK Persediaan;
- Keperluan operasional kendaraan dinas yang diperuntukan bagi unsur pimpinan yaitu kepala, wakil kepala, dan operasional

- kendaraan dilingkungan BPIP dengan cara bekerja sama dengan pihak pertamina retail untuk melakukan pengadaan Voucher BBM tersebut;
- Pelayanan Service Kendaraan merupakan salah satu kegiatan pelayanan pemeliharaan untuk asset BPIP oleh karena itu servis kendaraan mobil dinas merupakan sesuatu yang penting menjaga asset yang dimiliki dengan bekerja sama dengan pihak dealer terkait;
 - Pembayaran Keperluan Kantor Berupa kebutuhan sehari – hari kantor yaitu pembayaran , jasa pembuangan sampah, internet kantor maupun rumah dinas unsur pimpinan;
 - Pemeliharaan gedung kantor berupa perawatan berkala seperti kerusakan ac, toilet;
 - Jamuan rapat merupakan aktivitas yang sangat sering dilakukan setiap hari untuk mengakomodasi dan mendukung kegiatan rapat dengan pegawai internal maupun lintas instansi yang melaksanakan rapat di lingkungan BPIP;
 - Dana Operasional Kepala BPIP dan operasional BPIP dalam anggaran layanan perkantoran guna mendukung kegiatan kepala BPIP;
 - Melakukan pengamanan terhadap lingkungan BPIP dengan cara menggunakan bantuan Bagian Keamanan Dalam untuk menjaga kantor untuk memastikan keamanan di lingkungan BPIP;
 - Melakukan kegiatan keprotokolan umum untuk memudahkan koordinasi kegiatan di lingkungan BPIP, khususnya ketika ada kegiatan rapat unsur pimpinan yaitu dewan pengarah dan juga kepala maupun wakil kepala BPIP, dan berkoordinasi dengan protokol lintas instansi untuk menjalin kemudahan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan di lingkungan BPIP maupun di luar instansi BPIP;
 - Adminstrasi dan tata kelola persuratan unit kerja di lingkungan BPIP; dan
 - Layanan pengelolaan aset dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BPIP.

Pengawasan Internal

- Pengelolaan LHKPN dan LHKASN di Lingkungan BPIP;
- Penyusunan Kebijakan Pengawasan Internal;
- Reviu Laporan Kinerja BPIP Tahun 2019;
- Pengawasan Pelaksanaan SKD CPNS BPIP Tahun 2020;
- Implementasi SPIP di lingkungan BPIP;
- Implementasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan BPIP;
- Evaluasi SAKIP BPIP Tahun 2019;
- Pengenalan program pengendalian gratifikasi di lingkungan BPIP;
- Evaluasi Pertanggungjawaban Kegiatan Tahun Anggaran 2019 (BA 122) di Lingkungan BPIP
- Percepatan Penyelesaian Evaluasi Pertanggungjawaban Kegiatan Tahun Anggaran 2019 (BA 122) di Lingkungan BPIP dalam Rangka Persiapan Audit Laporan Keuangan BPIP oleh BPK;
- Reviu Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN BPIP TA 2019 oleh BPKP;
- Reviu Laporan Keuangan BPIP TA 2019;
- Koordinasi dan Penguatan Tindak Lanjut Hasil reviu BPKP atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada BPIP TA. 2019 ;
- Verifikasi Tunggal BPIP TA 2019 (BA 122);
- Reviu Atas Revisi Anggaran BPIP TA 2020; dan
- Reviu Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Belanja Modal BPIP Tahun 2020.

Pusat dan dan Informasi

- a) Layanan Jaringan berbasis wireless;
- b) Layanan informasi melalui website resmi BPIP dan e-mail resmi BPIP;
- c) Dukungan instalasi hardware dan software;
- d) Dukungan peliputan dan publikasi kegiatan-kegiatan di lingkungan BPIP; dan
- e) Pengembangan aplikasi guna penerapan e-government di lingkungan BPIP.

Dukungan sistem informasi dan aplikasi berbasis online mendukung e-government BPIP.

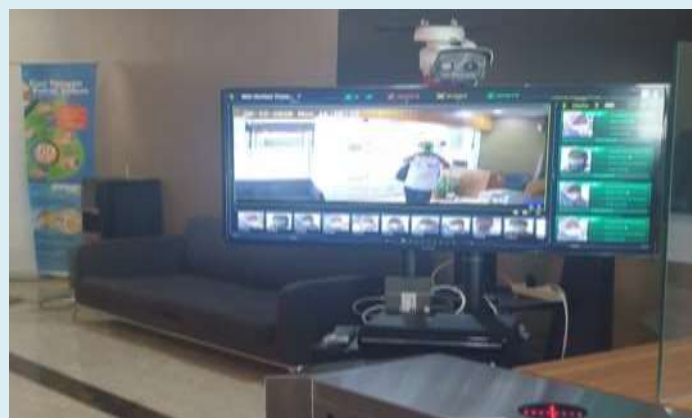
1. BPIP Portal (www.bpip.go.id)
2. BPIP Portal Backend (www.bpip.go.id/bpip/backend)
3. Email BPIP (<https://mail.bpip.go.id/>)
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum / JDIH (<https://jdih.bpip.go.id>)
5. Aplikasi Pengukuran Indeks Pancasila BPIP (<http://perisai.bpip.go.id/>)
6. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis / SIKD BPIP (<http://sikd.bpip.go.id/>)
7. Sistem SDM BPIP RI (<http://sdm.bpip.go.id/>)
8. Absensi Fabiola NG (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fabiola>)
9. FNG Backend System (<https://app.bpip.go.id/fng/public/>)
10. Cloud Drive System BPIP (<http://cloud.bpip.go.id/>)
11. Sistem Informasi Agenda Kerja / SiAJA (<https://app.bpip.go.id/siaja/>)
12. Sistem Informasi Arsip Data Pegawai / SiATAP (<https://siatap.bpip.go.id/>)
13. Sistem Informasi Jurnal Kinerja / SiJUKI (<https://app.bpip.go.id/sijuki/>)
14. Sistem Informasi Perjalanan Dinas (<https://app.bpip.go.id/siperjadin/>)
15. Sistem Informasi Penyalarsan (<https://app.bpip.go.id/silaras/>)
16. Sistem Informasi Pembentukan dan Peraturan (<http://snippet-bpip.id/>)
17. Sistem Informasi Perhitungan Uang Makan dan Tunjangan Kinerja Pegawai (<http://223.27.146.163:81/>)
18. SAS System (Desktop Application)
19. Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran (<https://sipa.bpip.go.id>)
20. Aplikasi Soal Pancasila – seleksi CPNS

Gambar 11. Sistem Informasi Berbasis Online di Lingkungan BPIP



Kilas peristiwa kegiatan dukungan manajemen BPIP





3.3 Perbandingan Indikator Tahun 2019 dan Tahun 2020

Tahun 2020 sasaran strategis Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila terdiri dari 6 (enam) indikator keberhasilan kinerja dan merupakan tahun pertama Rencana Strategis periode Tahun 2020-2024. Tahun 2019 Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mempunyai sasaran strategis “ *Terwujudnya Kelancaran Tugas, Transparansi dan Akuntabilitas BPIP*” dengan indikator :

1. Tingkat kepuasan terhadap dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya (100%).
2. Kualitas Laporan Keuangan BPIP berdasarkan Opini BPK (1 Laporan).

Terdapat perbedaan indikator keberhasilan Tahun 2019 dan 2020. Perbedaan capaian pada 2 (dua) tahun tersebut adalah sebagai berikut :

Gambar 12. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dan 2020

TAHUN 2019			TAHUN 2020		
Sasaran Strategis	IKU	Capaian Kinerja	Sasaran Strategis	IKU	Capaian Kinerja
Terwujudnya Kelancaran Tugas, Transparansi dan Akuntabilitas BPIP	1. Tingkat kepuasan terhadap dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya (100%).	100%	Terwujudnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel serta Pelayanan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Berkualitas Melalui Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.Nilai Reformasi Birokrasi	44,14
	2. Kualitas Laporan Keuangan BPIP berdasarkan Opini BPK	1 Laporan		2.Indeks Sistem MERIT	0,8
				3.Opini Laporan Keuangan oleh BPK	WTP
				4.Nilai SAKIP	B
				5.Indeks Profesionalisme ASN	30
				6.Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A (blm survei)

Sementara itu target capaian kinerja jangka menengah mewujudkan tata kelola BPIP yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan Pembinaan Ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik:

SASARAN DAN INDIKATOR	TARGET			
	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik				
- Nilai Reformasi Birokrasi	81,5	82	82,5	83
- Indeks Sistem MERIT	0,65	0,7	0,75	0,81
- Opini Laporan Keuangan oleh BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
- Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB
- Indeks Profesionalisme ASN	81,5	82	82,5	83
- Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	90%	90%	90%

3.4 Realisasi Anggaran

Kinerja Anggaran Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020 dapat dicapai dengan baik yaitu 95,74%. Pagu anggaran Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp105.625.414.000,-, realisasi per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp101.128.544.474,- atau sebesar 95,74%, dan sisa pagu anggaran sebesar Rp4.496.869.526,-. Dibandingkan dengan Tahun 2019, persentase realisasi anggaran Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Tahun 2020 mengalami kenaikan. Realisasi per Unit Eselon II adalah sebagai berikut.

No	Unit Kerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Sekretariat Utama	105.625.414.000	101.128.544.474	95,74
1	Biro Fasilitasi Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian	1.700.000.000	1.481.979.563	87,18
2	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	90.325.414.000	86.441.177.819	95,70
3	Biro Perencanaan dan Keuangan	4.600.000.000	4.488.690.854	97,58
4	Biro Hukum dan Organisasi	2.000.000.000	1.886.600.055	94,33
5	Biro Pengawasan Internal	1.000.000.000	969.623.941	96,96
6	Pusat Data dan Informasi	6.000.000.000	5.860.472.242	97,67

Gambar 13. Tabel Realisasi Anggaran per Unir Eselon II Settama BPIP

Perbandingan capaian realisasi anggaran tahun 2019 dan 2020 Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	2019	114.398.712.000	63.702.531.724	55,68%
2.	2020	105.625.414.000	101.128.544.474	95,74

3.5 Efisiensi Sumber Daya dan Upaya Perbaikan ke Depan

Upaya efisiensi yang dilakukan pada Tahun 2020, antara lain adalah:

1. Refokusing anggaran guna penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi Nasional. Dari pagu awal anggaran Rp216.998.054.000,- menjadi Rp160.050.978.000,-. Upaya efisiensi sebesar Rp6.947.076.000,-.
2. Struktur organisasi yang ramping dengan efisiensi tanpa jabatan pengawas pada unit kerja substantive dalam rangka pengayaan fungsi pada level administrator dan efektifitas koordinasi ke bawahnya.
3. Efisiensi anggaran dengan adanya saldo pagu anggaran pada Sekretariat utama, yaitu sebesar Rp4.496.869.526.

Kinerja Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2020 menunjukkan upaya perbaikan layanan dan dukungan kepada unit-unit teknis dan pimpinan BPIP. Namun dengan kondisi Lembaga yang relatif baru mandiri, masih banyak tantangan di masa datang, diantaranya yakni, bagaimana menjaga budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tatakelola pemerintahan agar terus baik bahkan meningkat ditengah tuntutan pelayanan yang makin beragam. Langkah atau upaya tindaklanjut tahun mendatang, antara lain adalah:

1. Internalisasi nilai-nilai dasar BPIP (andal-profesional-inovatif-integritas) kepada seluruh pejabat/pegawai BPIP.
2. Penguatan kelembagaan dengan mengisi perangkat-perangkat peraturan, dan sarana yang belum tersedia.

3. Pemenuhan SDM dengan standar kompetensi yang sesuai posisi dan pengisian jabatan yang masih kosong.

Adapun nilai kinerja organisasi Sekretariat Utama, berdasarkan metode pengukuran pada Bab II adalah sebagai berikut.

Unit	Indikator Kinerja (IK)	Perhitungan Capaian IK [Realisasi/Target*100%]	Perhitungan Nilai Kinerja (NK) Unit [Rata-Rata Capaian IK]	NK Unit	Ket
SEKRETARIAT UTAMA	Nilai Reformasi Birokrasi	$44,14/81*100\%=55\%$	$(55\%+127\%+100\%+88\%+37\%)/5 *100$	81,4	NKO
	Indeks Sistem Merit	$316,5/240*100\%=127\%$			
	Opini Laporan Keuangan oleh BPK	WTP=100%			
	Nilai SAKIP	$B/BB*100\%=70/80*100\%=88\%$			
	Indeks Profesionalisme ASN	$30/81*100\%=37\%$			
	Indeks Kepuasan Masyarakat	#NA			
Biro Fasilitas Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian	Persentase tingkat kepuasan terhadap dukungan teknis dan administrasi layana Biro Fas.DPTA	pemberian layanan 106 keg=100%	blm survei	blm survei	NKUK
Biro Umum dan SDM	Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan Biro Umum dan SDM	#NA	$(127\%+37\%+100\%+100\%+100\%+100\%+100\%)/7*100$	94,86	NKUK
	Indeks Merit	127%			
	Indeks Profesionalisme ASN	37%			
	Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia	$1/1*100\%=100\%$			
	Layanan manajemen Barang Milik Negara	$1/1*100\%=100\%$			
	Layanan Umum	$1/1*100\%=100\%$			
	Layanan Perkantoran	$1/1*100\%=100\%$			
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	$1/1*100\%=100\%$			
Biro Perencanaan dan Keuangan	Layanan Perencanaan	$1/1*100\%=100\%$	$(100\%+100\%+88\%)/3*100$	96	NKUK
	Opini Laporan Keuangan oleh BPK/ Layanan Manajemen Keuangan	WTP=100%			
	Nilai SAKIP/ Layanan Pemantauan dan Evaluasi	88%			
Biro Hukum dan Organisasi	Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan produk hukum, organisasi dan tata laksana, dan RB	#NA (blm survei)	$(55\%+100\%+100\%+100\%)/4 *100$	88,75	NKUK
	Nilai Reformasi Birokrasi	55%			
	Layanan Hukum	$1/1*100\%=100\%$			
	Layanan Manajemen Organisasi	$1/1*100\%=100\%$			
	Layanan Reformasi Birokrasi	$1/1*100\%=100\%$			
Biro Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	$87,50\%/100\%*100\%=87,50\%$	$(87,50\%+137\%)/2*100$	112,25	NKUK
	Nilai Tingkat Maturitas SPIP (Skala 1 s.d. 5)	$2,75/2*100\%=137\%$			
Pusat Data dan Informasi	tingkat Maturitas SPBE/Layanan data dan informasi	pemberian layanan TIK=100% (blm penilaian)	blm penilaian	blm penilaian	NKUK

Gambar 14. Tabel Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dan Nilai Kinerja Unit Kerja (NKUK)

Rincian Capaian indikator Kinerja Unit Kerja (Eselon II) di Lingkungan Sekretariat Utama tertuang dalam lampiran ikhtisar kinerja.

BAB IV PENUTUP

Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan unsur pendukung dalam sebuah organisasi, namun memiliki peran yang strategis dan mendasar dalam pengelolaan manajemen unit kerja dalam lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tidak hanya berperan dalam pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit saja, melainkan juga sebagai perekat, penopang, dan penunjang dalam organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dimana unsur-unsur perencanaan, evaluasi dan monitoring, serta pelayanan terhadap stakeholders internal, berawal dari unit-unit dalam sekretariat. Secara umum, sasaran strategis/program yang ditetapkan telah berhasil dicapai oleh Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, namun masih ada 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat yang belum dilaksanakan pada Tahun 2020.

Agar fungsi dan peran Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dapat secara optimal berjalan, dan secara otomatis mendorong peningkatan kinerja diperlukan beberapa langkah strategis, antara lain adalah sebagai berikut :


1. Penerapan sistem informasi terpadu (penerapan e-government yang baik) di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
2. Penguatan organisasi melalui penyelarasan uraian tugas, penyusunan dan penerapan SOP.
3. Keterlibatan aktif pimpinan dalam pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi .
4. Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas lingkungan kerja.
5. Pemanfaatan hasil penilaian kinerja individu untuk pengembangan karir serta reward and punishment.
6. Tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana kinerja dan anggaran di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

7. Melaksanakan publikasi dan pelayanan informasi yang berkualitas kepada stakeholder yang berkaitan dengan kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tujuan untuk memastikan kepada publik akan keakuratan sebuah informasi.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2019 ini, diharapkan dapat memberikan informasi kepada pimpinan dan seluruh pihak terkait lainnya. Sehingga, dapat diperoleh masukan, guna peningkatan kinerja dan bahan merumuskan kebijakan pada periode berikutnya.

LAMPIRAN

Lampiran I
Perjanjian Kinerja Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Karjono**
 Jabatan : Sekretaris Utama
 Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : **Yudian Wahyudi**
 Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, Juni 2020

Pihak Kedua,




Yudian Wahyudi

Pihak Pertama,



Karjono

| PK 2020 

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIS UTAMA**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2020
Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan pembinaan Ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Nilai Reformasi Birokrasi	81
	Indeks Sistem Merit	0,61
	Opini Laporan Keuangan BPK	WTP
	Nilai SAKIP	BB
	Indeks Profesionalisme ASN	81
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPIP

Anggaran : Rp. 105.625.414.000,-

Jakarta, Juni 2020

Kepala BPIP,


Yudian Wahyudi

Sekretaris utama,


Karjono

Lampiran II

Ikhtisar Kinerja Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila



BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

SASARAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN : KAPASITAS ORGANISASI (1)

SASARAN dan INDIKATOR [Sasaran dan Indikator Program]-[Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan]	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			Ket	Penanggungjawab
	Target	Realisasi	Rincian Keluaran		
Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik					
- Nilai Reformasi Birokrasi	81	44,14 (penilaian mandiri)	● Peningkatan Tata Kelola BPIP	Renstra BPIP	Karjono Sekretaris Utama
- Indeks Sistem Merit	0,61	316,5 (penilaian mandiri)	● Penataan manajemen SDM BPIP (250-324) – Indeks (0,61-0,8)=BAK	Renstra BPIP	
- Opini Laporan Keuangan oleh BPK	WTP	WTP	● Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Per-UU-an	Renstra BPIP	
- Nilai SAKIP	BB	B (penilaian mandiri)	● Implementasi akuntabilitas kinerja organisasi	Renstra BPIP	
- Indeks Profesionalisme ASN	81	30	● Mengukur kualifikasi, kompetensi, kinerja, disiplin ASN BPIP https://ip-jasn.bkn.go.id/diolah	Renstra BPIP	
- Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	Tahap penyusunan peraturan juknis	● Belum dilakukan Survey terhadap stakeholder yang mendapatkan manfaat dari BPIP	Renstra BPIP	
Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan, dan Kinerja					
Terlaksananya koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan Akuntabilitas					
- Layanan Perencanaan	1 layanan	1 layanan	● Renstra, Renja, RKAKL, DIPA, POK, Dok, Revisi Anggaran	Renstra BPIP	Tonny Agung Arifianto Karo Perencanaan dan Keuangan
- Opini Laporan Keuangan oleh BPK/ Layanan Manajemen Keuangan	WTP	WTP	● Laporan Keuangan, SPM, Edaran/Juknis Pengelolaan Keuangan	Renstra BPIP	
- Nilai SAKIP/ Layanan Pemantauan dan Evaluasi	BB	B	● PK, Renaksi PK, Pohon Kinerja, Lakip, Monev Bapp dan Keu	Renstra BPIP	
Pelaksanaan Manajemen Hukum dan Organisasi					
Terlaksananya koordinasi dan penyusunan produk hukum, dokumentasi dan informasi hukum, dan pembinaan penataan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi					
- Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan produk hukum, organisasi dan tata laksana, dan RB	100%	Belum dilakukan survei	● 100% terpenuhinya permintaan layanan Hukum dan Organisasi (Pememihan Dokumen)	Renstra BPIP	Surahno Karo Hukum dan Organisasi
- Nilai Reformasi Birokrasi	81	44,14	● Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Renstra BPIP	
- Layanan Hukum	1 Layanan	1 Layanan	● Dokumen Produk Peraturan Perundang-undangan BPIP dan Dokumentasi informasi Hukum	Renstra BPIP	
- Layanan Manajemen Organisasi	1 Layanan	1 Layanan	● Revisi OTK, SOP, Peta Proses Bisnis, Tata Naskah Dinas	Renstra BPIP	
- Layanan Reformasi Birokrasi	1 Layanan	1 Layanan	● Dokumen 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi	Renstra BPIP	


SASARAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN : KAPASITAS ORGANISASI (2)

SASARAN dan INDIKATOR [Sasaran dan Indikator Program]-[Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan]	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			Ket	Penanggungjawab
	Target	Realisasi	Rincian Keluaran		
Pelaksanaan Manajemen Sumber Daya Manusia, BMN, dan Ketatausahaan					
Terlaksananya koordinasi pengelolaan barang milik negara, pembinaan mental sumber daya manusia, pengelolaan karier dan kinerja sumber daya manusia, kerumahtanggaan					
- Persentase kepuasan unit kerja terhadap pengelolaan Barang Milik Negara, pengadaan barang/jasa pemerintah, perencanaan dan pengelolaan karier dan kinerja sumber daya manusia, kerumahtanggaan, dan keprotokolan umum, pengamanan, dan kearsipan yang berkualitas	100%	Belum dilakukan survei	100% terpenuhinya permintaan layanan Umum dan SDM (Pemenuhan Dokumen)	Renstra BPIP	Tri Purno Utomo Karo Umum dan SDM
- Indeks Merit	0,61	316.5 (penilaian mandiri)	Penataan manajemen SDM BPIP (250-324) – Indeks (0,61-0,8)=BAK	Renstra BPIP	
- Indeks Profesionalisme ASN	81	30	Pemutahiran https://ip-jasn.bkn.go.id	Renstra BPIP	
- Layanan manajemen Sumber Daya Manusia	1 Layanan	1 Layanan	Kenaikan pangkat, KGB, Adm Kepegawaian, Gaji dan Tunj, hak keuangan	Renstra BPIP	
- Layanan manajemen Barang Milik Negara	1 Layanan	1 Layanan	Daftar inventaris barang, pemenuhan sarana prasarana	Renstra BPIP	
- Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	pemenuhan kerumahtanggaan dan administrasi persuratan	Renstra BPIP	
- Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	pemenuhan kebutuhan perkantoran	Renstra BPIP	
- Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	pemenuhan belanja modal penunjang tuisi	Renstra BPIP	
Pelaksanaan Manajemen Fasilitas Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian					
Terlaksananya dukungan teknis dan administrasi bagi Dewan Pengarah, Staf Khusus Dewan Pengarah, Dewan Pakar, dan Kelompok Ahli					
- Persentase tingkat kepuasan terhadap dukungan teknis dan administrasi bagi Dewan Pengarah, Staf Khusus Dewan Pengarah, Dewan Pakar, dan Kelompok Ahli yang diberikan	100%	Belum dilakukan survei	100% terpenuhinya dukungan/fasilitas 106 kegiatan Dewan Pengarah, Kepala, Waka, dan Staf khusus Dewan Pengarah	Renstra BPIP	Sumoto Setyo Karo Fas. DP dan TA
Pelaksanaan Manajemen Pengawasan Internal					
Terlaksananya pengawasan intern di lingkungan BPIP					
- Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	87,50%	14 temuan terdiri dari 24 rekomendasi, 21 selesai	Renstra BPIP	Abbas Karo Wasnal
- Nilai Tingkat Maturitas SPIP (Skala 1 s.d. 5)	2	2,75	Penilaian Mandiri (BPKP belum mengeluarkan hasil evaluasi)	Renstra BPIP	
Pelaksanaan Manajemen Data dan Informasi					
Terlaksananya pengelolaan data dan informasi dan pengembangan Sistem informasi berbasis kemajuan teknologi dalam penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila					
- tingkat Maturitas SPBE/Layanan data dan informasi	4	Belum dilakukan penilaian	Pembangunan infrastruktur SPBE	Renstra BPIP	Yakop - Kapusdatin



JL. VETERAN III NO.2,
KECAMATAN GAMBIR,
KOTA JAKARTA PUSAT
DKI JAKARTA 10110



BPIP RI



PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA



@BPIPRI